

Bidang Ilmu : 241/Ilmu Politik

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PRODUK TERAPAN**



**MODEL PENGEMBANGAN RUMAH PINTAR PEMILU
SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK BERKELANJUTAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL
(Studi di KPU Kota Bukittinggi
dan KPU Provinsi Sumatera Barat)**

**DRA. AL RAFNI, M. Si. (NIDN 0012026808)
DRS. SURYANEF, M.Si. (NIDN. 0006066407)**

DIBIYAI OLEH :

DANA PNPB YANG DIALOKASIKAN DALAM DIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG
SESUAI SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN PRODUK TERAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR 1324/UN35.2/PG/2018
TANGGAL 16 APRIL 2018

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : MODEL PENGEMBANGAN RUMAH PINTAR PEMILU
SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK
BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI
KPU KOTA BUKITTINGGI DAN KPU PROVINSI SUMATERA
BARAT)

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dra. Al Rafni, M.Si
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Padang
NIDN : 0012026808
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Unit : FIS - Jurusan Ilmu Sosial Politik
Nomor HP : 08126608493
Alamat surel (e-mail) : alrafni@fils.unp.ac.id

Anggota Peneliti

NO	Nama	NIDN	Jabatan
1	Drs. Suryanef, M.Si	0006066407	Anggota Pengusul 1

Anggota Peneliti Mahasiswa

NO	Nama	NIM/TM	Prodi
1	Ahmad	14052001/2014	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2	MUTIA EKA MASPUTRI	14052047/2014	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Institusi Mitra

Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 41.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 100.000.000,00



Padang, 10 Desember 2018

Ketua

(Dra. Al Rafni, M.Si)
NIP/NIK 196802121993032001



RINGKASAN

Salah satu program prioritas nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu membentuk Rumah Pintar Pemilu (RPP) di setiap provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini dimulai tahun 2015 dengan pilot proyek 9 KPU provinsi dan 18 KPU kabupaten/kota. Tahun 2016 pilot proyek dilanjutkan pada 10 KPU provinsi dan diharapkan tahun 2018 seluruh provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia sudah memiliki RPP. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas pendidikan politik melalui RPP belum optimal. Demikian juga halnya dalam pengelolaan RPP sehingga berdampak pada pola pendidikan politik berkelanjutan. Oleh sebab itu perlu disusun model pengembangan RPP sebagai sarana pendidikan politik berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Untuk itu penelitian tahun I adalah : (1) menganalisis berbagai bentuk aktivitas pendidikan politik ; (2) menganalisis manajemen pengelolaan RPP ; (3) mengkonstruksikan model pengembangan RPP sebagai sarana pendidikan politik berkelanjutan berbasis kearifan lokal ; dan (4) menghasilkan : (a) buku pedoman pengelolaan RPP ; (b) buku pedoman materi pendidikan politik dan strategi pembelajarannya ; dan (c) buku panduan evaluasi RPP yang menyangkut panduan evaluasi penyelenggaraan pendidikan politik pada RPP dan evaluasi terhadap pengelolaan RPP. Sementara itu luaran yang ditargetkan pada tahun I adalah : (1) draf artikel ilmiah untuk jurnal nasional terakreditasi dan diupayakan *submit*, serta prosiding pada seminar nasional dan atau internasional ; dan (2) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas model pengembangan RPP yang dihasilkan.

Sementara itu pada tahun II bertujuan untuk : (1) melakukan sosialisasi buku pedoman RPP yang menyangkut materi pendidikan politik dan strategi penyampaian pembelajaran politik melalui RPP serta buku pedoman evaluasi RPP kepada KPU sebagai penyelenggara RPP ; (2) melakukan uji kelayakan model pengembangan RPP sebagai sarana pendidikan politik

berkelanjutan melalui reviu pakar ; dan (3) menghasilkan : (a) revisi model pengembangan RPP dan buku pedoman pengelolaan RPP ; (b) buku pedoman RPP yang menyangkut materi pendidikan politik dan strategi pembelajarannya, serta buku pedoman evaluasi RPP ; dan (c) artikel ilmiah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional, serta prosiding pada seminar nasional dan atau internasional. Metode penelitian adalah *Research and Development (R&D)* dengan tahapan berikut : analisis, desain, pengembangan, implementasi dan proses evaluasi. Model pengembangan dianggap komprehensif karena pada setiap tahapan dapat dievaluasi untuk menyempurnakan model (Morrison, Ross dan Kemp, 2010). Dengan ditemukannya model pengembangan berikut buku panduan diharapkan RPP dapat menjadi sarana pendidikan politik berkelanjutan berbasis kearifan lokal.